

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berupa kawasan hutan yang cukup besar dengan luas pada wilayah teresterialnya sebesar 120,6 juta hektar dan kawasan hutan perairan sebesar 5,3 juta hektar (KLHK, 2018). Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki hutan tropis dengan tingkat keragaman flora faunanya yang tinggi, sekitar 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia dan 40%-nya merupakan tumbuhan endemik Indonesia (Kusmana, 2015). Selain itu, Indonesia tercatat memiliki 1.605 jenis burung, 723 jenis reptil, 385 jenis amphihi, 720 jenis mamalia, 1.248 jenis ikan air tawar, 197.964 jenis invertebrata, 5.137 jenis arthropoda (Darajati, et.al, 2016), sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara mega biodiversity terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia. Salah satu pusat habitat keragaman hayati tersebut terdapat pada kawasan hutan khususnya hutan konservasi.

Undang – undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa hutan konservasi adalah merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi di Indonesia meliputi areal seluas 27,26 juta hektar atau 18 % dari luas kawasan hutan (KLHK, 2018). Penetapan kawasan konservasi tersebut ditujukan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga

dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Kehilangan nilai dan fungsi hutan akibat degradasi maupun deforestasi yang terjadi di Indonesia secara langsung memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat seperti banjir, tanah longsor dan perubahan iklim. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2018, laju deforestasi kawasan hutan Indonesia sebesar 1.1 juta ha/tahun pada periode 2009 – 2013 dan pada periode 2013 – 2017 meningkat menjadi 1.4 juta ha/tahun. Fakta yang terjadi pada pengelolaan kawasan hutan di Indonesia akan menjadi ancaman bagi kelangsungan kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya khususnya pada kawasan hutan konservasi.

Menurut Yusri (2012) faktor sosial ekonomi adalah merupakan hal yang mendasari ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. Lebih lanjut dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan di luar kawasan maka kecenderungan untuk membuka dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan juga semakin kecil. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan di luar kawasan maka kecenderungan untuk membuka dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan pun semakin besar. Untuk menjaga keutuhan kawasan hutan konservasi agar tetap lestari, perlu ada paradigma atau cara berpikir yang holistik memandang tanggung jawab pengelolaan hutan konservasi bukan semata domain pemerintah untuk melindungi, namun perlu ada keterlibatan atau peran masyarakat sebagai subjek melalui peran aktif dan pemahaman mereka dalam menyikapi keberadaan hutan disekitarnya (Wiratno, 2018).

Secara administrasi, wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi, berupa pemukiman masyarakat maupun kawasan hutan adalah merupakan daerah penyangga yang akan mempengaruhi keutuhan dan kelestarian kawasan konservasi itu sendiri, oleh karena itu daerah penyangga harus dikelola dengan baik. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan daerah penyangga dapat dilakukan melalui pembinaan fungsi daerah penyangga yang meliputi; a). Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya; b). Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan c. Peningkatan produktivitas lahan). Penetapan daerah penyangga kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) menjadi tanggung jawab menteri atas nama pemerintah jika wilayahnya berupa kawasan hutan lindung dan hutan produksi, sedangkan kawasan penyangga diluar kawasan hutan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Salah satu kawasan konservasi yang terdapat di wilayah Provinsi Gorontalo adalah Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto. Penetapan kawasan konservasi ini mengemban mandat untuk perlindungan keanekaragaman hayati flora dan faunanya khususnya satwa babirusa dan anoa serta perlindungan bentangan alam dengan fungsi hidrologinya sebagai sumber air bagi wilayah sekitarnya. Secara administrasi, kawasan ini terletak pada 3 wilayah kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan 20 desa

penyangga kawasan. Perambahan, *Illegal logging*, perburuan liar dan penambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan ancaman kawasan hutan yang selama ini terjadi sehingga secara langsung menyebabkan terjadinya degradasi kawasan hutan SM Nantu-Boliyohuto sebagai habitat keanekaragaman flora fauna didalamnya (BKSDA Sulut, 2016).

Desa Saritani merupakan salah satu desa penyangga kawasan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto dan secara administratif berada diwilayah Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Keberadaan desa ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan kawasan hutan, hal ini disebabkan oleh aksesibilitas masyarakat dengan kawasan hutan dapat dilakukan dengan mudah karena keberadaan pemukiman masyarakat menuju hutan sangat berdekatan jika dibandingkan dengan keberadaan desa penyangga lainnya untuk dapat mengakses sumberdaya alam yang ada didalamnya. Disamping itu, keberadaan dan aktivitas masyarakat Desa Saritani secara langsung akan mempengaruhi wilayah perlindungan keanekaragaman hayati (blok inti) yang merupakan kunci keberlanjutan keberadaan kawasan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto.

Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan disebabkan karena kurangnya pemahaman serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah sehingga merupakan permasalahan dan akan menjadi ancaman bagi keberadaan hutan konservasi. Dengan kondisi ini, pengelolaan kawasan hutan konservasi dimasa depan akan menghadapi tantangan besar khususnya SM Nantu-Boliyohuto sehingga pengembangan daerah penyangga kawasan khususnya wilayah Desa Saritani perlu dilakukan sebagai bagian dari fungsi perlindungan kawasan hutan

untuk mempertahankan keutuhannya demi mencapai kondisi lingkungan hutan yang lestari dalam mempertahankan keragaman hayati dan ekosistemnya.

1.2. Identifikasi Masalah

Daerah penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto adalah terdiri dari wilayah yang berfungsi sebagai :

- a. Kawasan hutan (Hutan Lindung dan Hutan Produksi)

Kawasan hutan dapat dilakukan pengelolaan dengan memanfaatkan hasil hutan secara legal baik untuk pemanfaatan oleh masyarakat maupun oleh badan usaha dengan tujuan komersil.

- b. Non Kawasan Hutan (lahan perkebunan, pertanian dan pemukiman)

Daerah penyangga non kawasan hutan berupa wilayah administrasi desa/pemukiman yang didalamnya terdapat berbagai macam aktivitas serta interaksi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagai suatu dinamika kehidupan yang berkembang sesuai perkembangan jaman.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang menjadi variabel penelitian adalah berkisar pada tingkat kesejahteraan kehidupan dan pemahaman masyarakat Desa Saritani dalam rangka pengembangan daerah penyangga untuk menunjang dan mendukung dalam pengelolaan kawasan hutan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Saritani sebagai daerah penyangga kawasan SM. Nantu-Boliyohuto ?
- b. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Saritani terhadap kawasan konservasi SM. Nantu-Boliyohuto ?
- c. Bagaimana strategi pengembangan Desa Saritani sebagai daerah penyangga Kawasan SM. Nantu-Boliyohuto ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Saritani sebagai wilayah penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto.
- b. Mengetahui tingkat Pemahaman masyarakat Desa Saritani terhadap kawasan hutan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto.
- c. Mengetahui dan merumuskan langkah strategis pengembangan wilayah Desa Saritani sebagai daerah penyangga kawasan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Kajian hasil penelitian dapat memberikan data dan informasi mengenai karakteristik sosial ekonomi serta tingkat pemahaman masyarakat desa sebagai penyangga kawasan hutan.

2. Kajian hasil penelitian menjadi dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dan pengembangan daerah penyangga kawasan hutan konservasi.

b. Manfaat Praktis

1. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam rangka penelitian ilmiah terutama pada aspek sosial ekonomi dan pemahaman masyarakat daerah penyangga.
2. Hasil penelitian menjadi bahan rujukan pemerintah dalam hal ini pengelola kawasan SM Nantu-Boliyohuto untuk mengelola dan mengembangkan daerah penyangga kawasan hutan konservasi.